



Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir dari Masa ke Masa: Transformasi Administrasi Wilayah (1998-2024)

Ryan Zulyansyah¹, Dinda Husnita², Septiana Intan³, Ahmal⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau, Indonesia

E-mail : ryan.zulyansyah3725@student.unri.ac.id¹, dinda.husnita1577@student.unri.ac.id²,
septiana.intan6022@student.unri.ac.id³, ahmal@lecturer.unri.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 21, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Regency, Riau, Government,
Change

ABSTRACT

Rokan Hilir Regency is one of the strategically located coastal areas in Riau Province, both geographically, economically, and historically. The development of Rokan Hilir has progressed gradually and dynamically, in line with the national transformation following the Reform era, which has influenced regional governance and development patterns in Riau Province. This regency reflects significant administrative and ecological changes, particularly in managing a vast and diverse territory. One of the key initiatives has been the subdivision of districts, which, since its implementation under Regional Regulation Number 9 of 2014 up to 2024, has proven to enhance governmental effectiveness, accelerate the delivery of basic services, and strengthen local-level development monitoring mechanisms. The district subdivision also enables more targeted resource allocation and development planning, allowing for more efficient inter-regional coordination. To sustain these improvements, the Rokan Hilir Regency government is advised to continue enhancing the capacity of officials in each new district and to utilize information technology and data-based monitoring systems to support planning, management, and evaluation of development more precisely.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 18, 2025

Revised November 23, 2025

Accepted November 26, 2025

Kata Kunci:

Kabupaten, Riau, Pemerintah,
Perubahan

ABSTRACT

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Riau yang memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun historis. Secara keseluruhan, perkembangan Rokan Hilir merupakan perjalanan panjang yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Sejalan dengan transformasi nasional pascareformasi, perubahan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah juga berpengaruh pada struktur administratif dan pola pembangunan di Riau. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah penting di Provinsi Riau yang menggambarkan perubahan sosial, administratif, dan ekologis Indonesia pada era pascareformasi. Hingga tahun 2024, implementasi pemekaran kecamatan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 terbukti mendukung peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat distribusi layanan dasar, dan memperbaiki mekanisme monitoring pembangunan di tingkat lokal. Secara umum, proses pemekaran kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan karakteristik lingkungan yang beragam. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya terus meningkatkan kapasitas aparatur di setiap kecamatan baru untuk



menjamin efektivitas perencanaan, koordinasi, dan distribusi layanan publik, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemantauan berbasis data.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ryan Zulyansyah

Universitas Riau

E-mail: ryan.zulyansyah3725@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Riau yang memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun historis. Berlokasi di bagian timur Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, daerah ini sejak masa lampau menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan penduduk lokal dengan para pedagang dari berbagai wilayah, seperti Tiongkok, India, dan kawasan Melayu. Aktivitas perdagangan tersebut memberi pengaruh besar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya di daerah pesisir seperti Bagansiapiapi, Panipahan, dan Sinaboi.

Secara historis, sebelum menjadi kabupaten, Rokan Hilir berada di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan menggunakan sistem pemerintahan adat Melayu yang dipimpin oleh penghulu dan tokoh adat. Ketika pemerintahan kolonial Belanda masuk, sistem tersebut diubah menjadi struktur pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini berada di bawah administrasi Kabupaten Bengkalis. Proses panjang dalam dinamika pemerintahan tersebut membentuk identitas sosial dan politik masyarakat Rokan Hilir.

Perubahan besar terjadi pada era reformasi melalui kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Rokan Hilir resmi berdiri pada 4 Oktober 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Tujuan pembentukannya adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengelola potensi daerah secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, Rokan Hilir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awal abad ke-20, Bagansiapiapi bahkan pernah dikenal sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di dunia. Komunitas nelayan, terutama dari etnis Tionghoa, mampu menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga menciptakan pusat aktivitas ekonomi yang maju di kawasan pesisir. Namun, seiring perubahan arah kebijakan ekonomi nasional dan munculnya sektor-sektor baru, perekonomian daerah ini bergeser dari sektor perikanan menuju perkebunan dan industri migas. Wilayah seperti Bagan Sinembah dan Tanah Putih berkembang sebagai sentra perkebunan serta perdagangan, sementara sektor migas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, meski juga membawa tantangan sosial dan lingkungan yang harus dikelola dengan baik.



Perkembangan ekonomi tersebut turut mendorong perubahan sosial, termasuk terjadinya urbanisasi di wilayah-wilayah yang menjadi pusat industri. Penduduk dari berbagai daerah datang dan bermukim, sehingga memperkaya keragaman etnis masyarakat. Etnis Melayu, Tionghoa, Banjar, Jawa, Batak, Minangkabau, dan kelompok lainnya hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Keragaman ini tercermin dalam banyak aspek, mulai dari pola pemukiman, kegiatan ekonomi, bahasa sehari-hari, hingga kuliner. Masyarakat Rokan Hilir dikenal memiliki kehidupan sosial yang terbuka dan menjunjung toleransi.

Melihat perjalanan sejarah serta perkembangan yang dialami, Rokan Hilir memperlihatkan bahwa transformasi wilayah ini merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh beragam faktor dari dalam maupun luar daerah. Perubahan sistem pemerintahan mulai dari masa adat Melayu, periode kolonial, era setelah kemerdekaan, hingga pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan dinamika yang tidak sederhana dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang modern. Peralihan orientasi ekonomi dari sektor perikanan ke perkebunan dan industri migas juga menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Di sisi lain, keberagaman sosial budaya hasil pertemuan berbagai kelompok etnis menjadi kekuatan yang memperkuat identitas Rokan Hilir sebagai wilayah yang inklusif dan memiliki karakter terbuka.

Dengan demikian, menelusuri perkembangan Rokan Hilir tidak hanya memberikan gambaran tentang proses pertumbuhan politik, ekonomi, dan sosial suatu wilayah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas daerah terbentuk melalui rangkaian pengalaman sejarah yang panjang dan kompleks. Studi mengenai Rokan Hilir menjadi penting untuk memahami bagaimana sebuah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki, menghadapi berbagai tantangan, serta merancang arah pembangunan masa depan berdasarkan jejak sejarah yang telah ditempuh.

Secara keseluruhan, perkembangan Rokan Hilir merupakan perjalanan panjang yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Perubahan sistem pemerintahan dari tradisional ke modern, pergeseran ekonomi dari perikanan menuju sektor perkebunan dan migas, serta transformasi status menjadi kabupaten yang berdiri sendiri merupakan bagian penting dalam memahami sejarah wilayah ini. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial di Rokan Hilir sangat relevan untuk melihat bagaimana daerah ini membangun identitas sekaligus mempersiapkan masa depannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur, atau studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber tepercaya lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Nazir (2015:111) yang menjelaskan bahwa studi literatur adalah proses pengumpulan data melalui penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Suharsimi Arikunto (2002:90), yang menyatakan bahwa studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi dari buku, majalah, surat kabar, dan berbagai literatur lain untuk membangun landasan teori dalam penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Lebih dari 17.000 pulau terletak di antara dua benua dan dua samudra, membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia berada di lokasi strategis dengan banyak keanekaragaman hayati, tetapi juga rentan terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Pada tingkat masyarakat, krisis ekonomi Asia tahun 1998 menandai transisi besar menuju era Reformasi. Perubahan ini memungkinkan demokratisasi, kebebasan berpendapat, dan desentralisasi politik melalui otonomi daerah.

Konsumsi domestik, ekspor komoditas, dan reformasi tata kelola mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang stabil dari tahun 1999 hingga 2010. Secara sosial, peningkatan program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014 menunjukkan peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. Dari tahun 2015 hingga 2024, negara akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mencakup peningkatan akses energi serta transportasi darat, laut, dan udara. Pemekaran wilayah menjadi fenomena penting pascareformasi, terutama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Antara 1999 dan 2014, ratusan kabupaten dan kota baru dibentuk. Pada 2022, tiga provinsi baru di Tanah Papua Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diresmikan, disusul Papua Barat Daya pada tahun yang sama. Hingga 2024, pemekaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan stabilitas regional.

Dalam konteks perkembangan nasional Indonesia sejak era Reformasi 1998 hingga 2024, Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah strategis yang memperlihatkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Terletak di bagian tengah Pulau Sumatra, Riau memiliki luas wilayah daratan sekitar 87.000 km² serta kawasan perairan pesisir yang menghadap langsung Selat Malaka salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Kondisi geografis ini menjadikan Riau memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam sektor energi, perkebunan, dan perdagangan.

Sejalan dengan transformasi nasional pascareformasi, perubahan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah juga berpengaruh pada struktur administratif dan pola pembangunan di Riau. Kebijakan otonomi daerah membuka ruang bagi peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam, yang sebagian besar didominasi minyak bumi, gas alam, serta perkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan, pertumbuhan penduduk dan mobilitas sosial di Riau mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh arus migrasi ekonomi dari berbagai wilayah Indonesia.

Namun, dinamika pembangunan tersebut memunculkan tantangan ekologis, seperti deforestasi dan degradasi lahan gambut yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan musiman. Dalam runtun waktu tahun 1998–2024, isu ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan stabilitas lingkungan dan kesehatan masyarakat lintas wilayah. Pemerintah pusat dan daerah kemudian mengembangkan regulasi restorasi gambut serta strategi penegakan hukum untuk menekan kerusakan lingkungan. Hingga 2024, Riau berada pada tahap konsolidasi pembangunan yang menekankan penguatan ekonomi berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Posisi geografis strategis, ditambah integrasi kebijakan nasional, menempatkan Riau sebagai wilayah penting dalam jaringan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



(Sumber : Database Peraturan BPK)

Gambar 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu wilayah penting di Provinsi Riau yang menggambarkan perubahan sosial, administratif, dan ekologis Indonesia pada era pascareformasi. Kabupaten ini dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 yaitu yang mekar dari Kabupaten Bengkalis, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai otonomi daerah yang berkembang pesat setelah 1998. Dalam kerangka tersebut, pembentukan Rokan Hilir bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah pesisir Riau, serta memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Fenomena ini sejalan dengan pola pemekaran wilayah di Indonesia, di mana pemerintah menilai desentralisasi sebagai instrumen penting untuk memperbaiki kualitas administrasi dan memperluas jangkauan pembangunan.

Secara geografis, Rokan Hilir terletak di bagian barat pesisir Riau dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Wilayah ini memiliki karakter geomorfologi dataran rendah, rawa gambut, serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut menjadikan Rokan Hilir memiliki potensi ekonomi berbasis perikanan, perkebunan, pertanian, dan industri minyak dan gas bumi. Kawasan ini juga berada pada jalur pelayaran tradisional lintas Selat Malaka, sehingga memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan regional. Karakter geografis serupa juga terlihat pada Provinsi Riau secara keseluruhan, yang dikenal sebagai wilayah dengan sumber daya alam melimpah namun dihadapkan pada tantangan ekologis yang kompleks.



Transformasi ekonomi di Rokan Hilir sejak 1999 hingga 2024 menunjukkan perkembangan signifikan, terutama pada sektor migas dan perkebunan kelapa sawit. Berbagai kecamatan di wilayah ini pernah menjadi salah satu kontributor produksi minyak bumi di Riau, baik melalui sumur-sumur tua maupun pengelolaan oleh perusahaan energi nasional dan swasta. Sementara itu, sektor perkebunan berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan global terhadap komoditas sawit. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong pergeseran struktur sosial masyarakat, termasuk meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi lokal, serta berkembangnya sentra-sentra ekonomi baru.

(Sumber : Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.)



Gambar 2. BAB II PERDA Nomor 24 Tahun 2002

Namun demikian, sebagaimana dialami banyak wilayah di Riau, dinamika pembangunan di Rokan Hilir juga memunculkan tantangan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Ketergantungan pada lahan gambut dan perluasan perkebunan intensif meningkatkan risiko kebakaran hutan musiman, terutama pada periode kemarau panjang. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi kesehatan dan mobilitas penduduk setempat, tetapi juga berdampak pada wilayah regional dan negara tetangga. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah kemudian mengimplementasikan strategi pengelolaan gambut yang lebih ketat, program restorasi ekosistem, serta penguatan sistem mitigasi kebakaran. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir terjadi dengan berbagai macam pertimbangan terutama ialah untuk kemajuan dalam segi ekonomi ataupun sosial masyarakat. Pada tahun 2002 melalui perda nomor 24 tahun 2002 Rokan Hilir mengalami perubahan serta perkembangan wilayah yaitu adanya pemekaran kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan juga kecamatan Bangko Pusako.



(Sumber Dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.))

Gambar 3. PERDA Nomor 9 Tahun 2014



Selanjutnya melalui **Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014** merupakan langkah strategis dalam memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah pada era desentralisasi. Rokan Hilir, dengan karakter wilayah yang luas dan heterogen meliputi kawasan pesisir, lahan gambut, serta permukiman yang tersebar membutuhkan struktur administrasi yang mampu merespons kebutuhan pelayanan publik secara cepat dan terukur. Pemekaran kecamatan dipandang sebagai solusi untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, sehingga koordinasi pembangunan dapat berjalan lebih efisien. Perda Nomor 9 Tahun 2014 disusun berdasarkan pertimbangan teknis mengenai peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan pusat kegiatan ekonomi lokal, dan kebutuhan penataan ruang yang lebih presisi. Dengan terbentuknya kecamatan-kecamatan baru, pemerintah daerah memperoleh fleksibilitas lebih besar dalam pengalokasian anggaran, penempatan aparatur, serta pengelolaan infrastruktur. Perubahan ini juga memperkuat kemampuan daerah dalam menangani isu strategis, seperti mitigasi kebakaran lahan dan pengelolaan wilayah pesisir yang memerlukan perhatian administratif khusus.

Hingga tahun 2024, implementasi pemekaran kecamatan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 terbukti mendukung peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat distribusi layanan dasar, dan memperbaiki mekanisme monitoring pembangunan di tingkat lokal. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya Rokan Hilir dalam menyesuaikan diri dengan dinamika wilayah dan meningkatkan kualitas tata kelola sesuai kerangka desentralisasi nasional.

Sejak berdirinya Kabupaten Rokan Hilir di tahun 1999 sedikitnya kecamatan di Rokan Hilir saat ini sudah mencakup hingga 18 Kecamatan, yaitu Bagan Sinembah, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya, Bangko, Bangko Pusako, Batu Hampar, Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, Perkaitan, Pujud, Rantau Kopar, Rimba Melintang, Simpang Kanan, Sinaboi, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan. Hal inilah yang menunjukkan serta menjadi bukti bahwa sejak awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir banyak perkembangan secara administasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu dilakukan bukan hanya sekedar bentuk pemekaran wilayah saja, namun hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan berbagai bidang mulai dari ekonomi sosial, budaya, infrastuktur dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Secara umum, proses pemekaran kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan karakteristik lingkungan yang beragam. Penataan administratif ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, pertumbuhan penduduk, serta berkembangnya pusat kegiatan ekonomi yang memerlukan pengelolaan lebih terfokus. Melalui pemekaran kecamatan, rentang kendali pemerintahan menjadi lebih pendek, sehingga koordinasi pembangunan dan distribusi layanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Pembentukan wilayah administratif baru juga memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merancang perencanaan pembangunan yang lebih presisi, terutama terkait pengelolaan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi risiko lingkungan. Dengan struktur



pemerintahan yang lebih tersegmentasi, alokasi sumber daya baik aparatur maupun anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kecamatan, sehingga efektivitas pelaksanaan program publik meningkat secara signifikan.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya terus meningkatkan kapasitas aparatur di setiap kecamatan baru untuk menjamin efektivitas perencanaan, koordinasi, dan distribusi layanan publik, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemantauan berbasis data untuk pengelolaan administrasi dan sumber daya secara lebih presisi. Evaluasi berkala terhadap struktur kecamatan juga diperlukan agar penataan wilayah tetap adaptif terhadap perubahan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan karakteristik geografis. Selain itu, penguatan koordinasi lintas kecamatan penting dilakukan untuk memastikan kesinambungan pembangunan regional, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur, kawasan pesisir, dan lahan kritis, sehingga pemekaran kecamatan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana. L. dkk. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Hompage*, 5(1): 1-12
- Aprian, dkk. (2022). Negeri Seribu Kubah: Identitas Arsitektur Rokan Hilir dan Pengaruh Selera Penguasa pada Era Pasca Reformasi. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 11(3)
- Manghayu. A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5(2): 95-115
- Mulyo. S.S, dkk. (2018). *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. Depok: Prenedamedia Group
- Nurindah Sari. (2024). Problematika Pembangunan Masyarakat Nelayan (Studi Keadaan Pendidikan, Ekonomi Dan Hubungan Sosial Masyarakat Di Pesisir Pantai Galesong Selatan Kabupaten Takalar). Tesis: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Database Peraturan BPK (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999*
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (2019). *PERDA Nomor 24 Tahun 2002*